

Dibandingkan dengan periode Renstra tahun 2019 – 2024 (sebelumnya), kondisi indeks kapasitas fiskal daerah turun dari 1,894 menjadi 1,554 atau turun sebesar 17,95 %, hal ini disebabkan karena perubahan regulasi kebijakan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ke Undang-undang Nomor 1 tahun 2022.

- 3.1.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada) Kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan jika dibandingkan dengan kapasitas fiskal daerah pada 10 provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

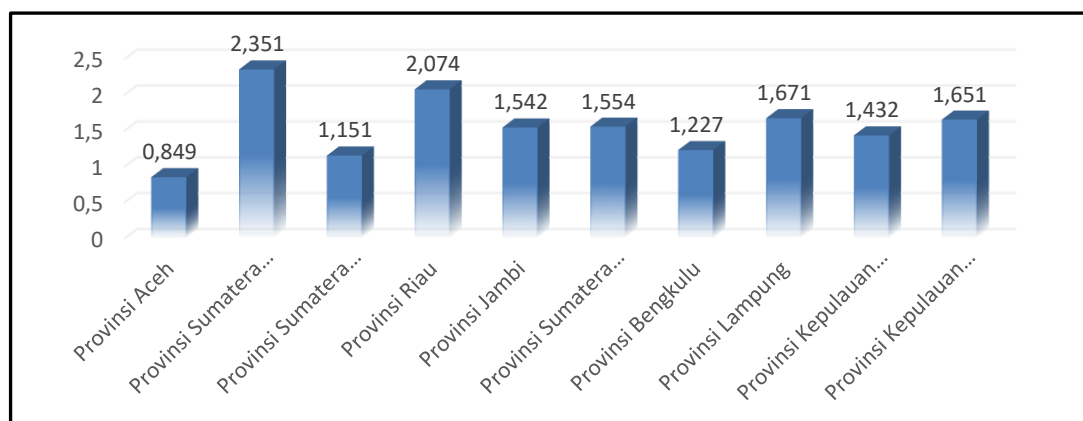
Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Indeks Kapasitas Fiskal Sumsel Dengan Standar Nasional

No.	Provinsi Pulau Sumatera	Kinerja Tahun 2025	
		Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
1.	Provinsi Aceh	0,849	Sangat Rendah
2.	Provinsi Sumatera Utara	2,351	Tinggi
3.	Provinsi Sumatera Barat	1,151	Rendah
4.	Provinsi Riau	2,074	Sedang
5.	Provinsi Jambi	1,542	Rendah
6.	Provinsi Sumatera Selatan	1,554	Sedang
7.	Provinsi Bengkulu	1,227	Rendah
8.	Provinsi Lampung	1,671	Sedang
9.	Provinsi Kepulauan Riau	1,432	Rendah
10.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1,651	Rendah

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD dan Kemenkeu

Posisi kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam wilayah Pulau Sumatera berada pada peringkat 3 (tiga) tertinggi setelah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.



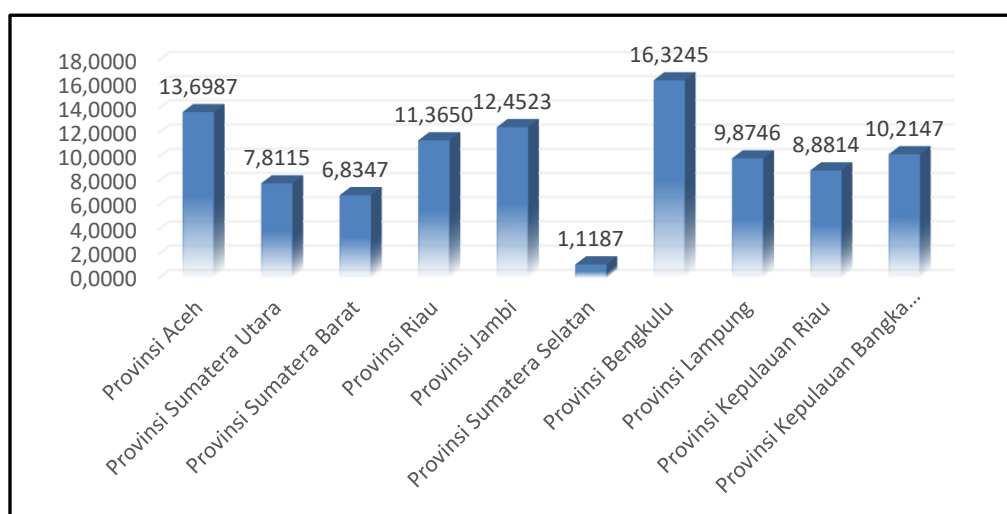
Gambar 3.2
Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data KEMENKEU

Kondisi indeks kapasitas fiskal daerah dengan perbandingan pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera mengindikasikan bahwa indeks kapasitas fiskal daerah tertinggi pada Provinsi Sumatera Utara sebesar 2,351, kemudian Provinsi Riau sebesar 2,074. Indeks kapasitas fiskal daerah terendah pada Provinsi Aceh sebesar 0,849, sementara posisi indeks kapasitas fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan berada pada kelima dengan indeks sebesar 1,151.

dikendalikan untuk tetap terjaga pada garis normal yang diharapkan sehingga deviasi yang diharapkan semakin rendah untuk meningkatkan kredibilitas pendapatan asli daerah pada kondisi perencanaan awal

3.1.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Apabila dibandingkan dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera, maka Provinsi Sumatera Selatan berada pada posisi:



Gambar 3.5

Grafik Perbandingan Deviasi Realisasi PAD 2025 dengan Standar Nasional
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD dan Kemenkeu

Nilai deviasi terendah pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,1187 dan nilai deviasi tertinggi pada Provinsi Bengkulu dengan nilai deviasi sebesar 16,3245. Kondisi kredibilitas *revenue mobilization* pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera mengalami kontraksi atau deviasi yang menjauh dari garis normal karena perubahan regulasi kebijakan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ke Undang-undang Nomor 1 tahun 2022.

Dimana pencatatan realisasi pendapatan bagi hasil pajak PKB dan pajak BBN-KB ke Kabupaten/Kota tidak lagi dicatat pada akun Pemerintah Provinsi dan langsung diterima oleh rekening RKUD Kabupaten/Kota secara real time payment pada saat wajib pajak membayar pajak.

Tabel 3.22

Realisasi Kinerja Kemandirian Fiskal Sumsel Tahun 2025 dan Target RPJMD

No.	Uraian	Kemandirian Fiskal		Capaian Kinerja
		Realisasi 2025	Target RPJMD 2030	
1.	IKF	0,478	0,520	91,923 %
2.	Pendapatan	9.427.430.159.702,67	13.549.281.593.204,80	0,520
3.	TKD	4.918.233.084.557,00	6.468.639.847.802,56	

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Capaian realisasi kinerja kemandirian fiskal Sumatera Selatan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan rencana target dalam RPJMD tahun 2025-2029, dimana pada tahun 2030 telah mencapai 91,923 %.

Capaian kinerja realisasi indeks kemandirian fiskal daerah tahun 2025 sudah sesuai (*on the track*) untuk mencapai target optimis akhir periode RPJMD tahun 2025 – 2029 serta akhir periode Renstra tahun 2025 – 2029 yang saat ini sudah mencapai sebesar 91,923 %.

Tabel 3.23

Capaian Kinerja Realisasi Indeks Kemandirian Fiskal Sumsel Tahun 2025

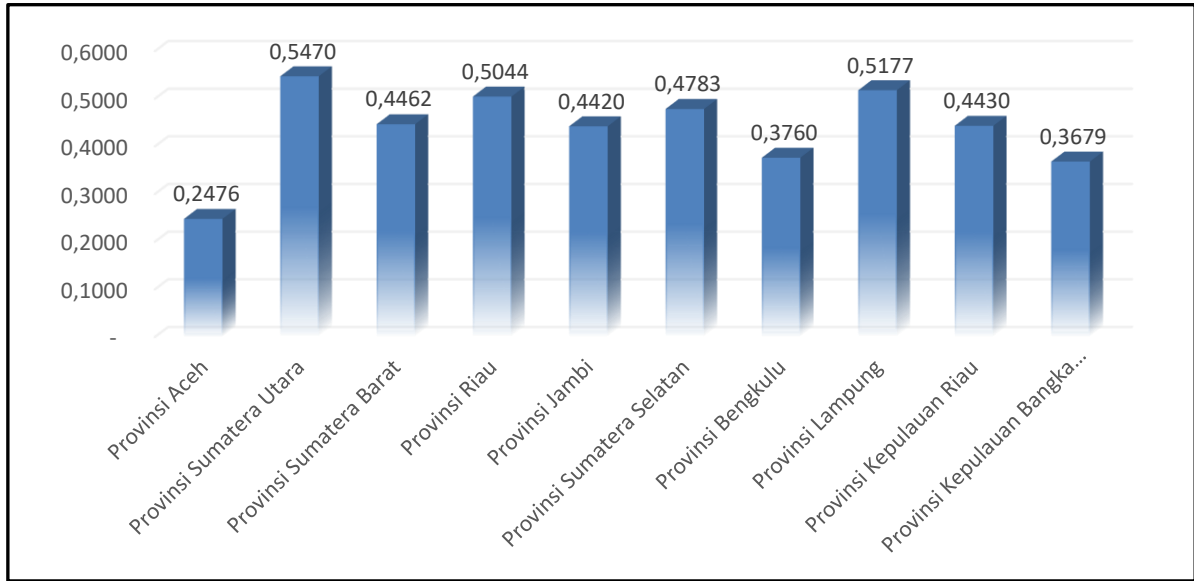
No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,478	0,520	91,923

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan LRA BPKAD Sumsel 2025

Tingkat kemajuan indeks kemandirian fiskal daerah pada tahun 2025 telah mencapai 91,923 % hal ini mengindikasikan bahwa strategi yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang ada.

3.1.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Kemandirian fiskal daerah Provinsi Sumatera Selatan apabila dibandingkan dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera, maka akan memberikan gambaran sebagai berikut:



Gambar 3.7

Grafik Perbandingan Indeks Kemandirian Fiskal dengan Standar Nasional
Sumber : Bapenda Sumsel berdasarkan Data LRA BPKAD dan Kemenkeu

Provinsi dengan nilai IKF tertinggi pada Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,5470 dengan kategori mandiri sementara nilai IKF terendah pada Provinsi Aceh dengan nilai IKF 0,2476 dengan kategori belum mandiri. Posisi Provinsi Sumatera Selatan pada urutan ke 4 (keempat) dengan nilai IKF 0,478 dengan kategori daerah menuju kemandirian fiskal.

Tabel 3.32
Capaian Realisasi Kinerja IKSS 3 Tahun 2025 Terhadap Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
4.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	(10,258)	1,48	(5,5)

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Kondisi realisasi pertumbuhan pendapatan daerah mengalami kontraksi negatif, sehingga tingkat kemajuan dari periode akhir RPJMD tahun 2025 – 2029 dan periode akhir Renstra tahun 2025 – 2029 masih mengalami tingkat kemajuan yang negatif sebesar (5,5 %), hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi dari Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ke Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 dengan pemberlakuan Opsen PKB dan Opsen BBN-KB yang menyebabkan penurunan pendapatan daerah.

3.1.4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Realisasi kinerja pertumbuhan pendapatan daerah pada 10 (sepuluh) daerah provinsi di Pulau Sumatera Selatan memberikan gambaran bahwa perbandingan pertumbuhan sebagai berikut:

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 3 Tahun 2025 Terhadap Standar Nasional

No.	Provinsi	Pendapatan Daerah		Pertumbuhan (%)
		2024	2025	
1.	Aceh	11.396.040.000.000,00	9.903.940.000.000,00	(13,0931)
2.	Sumatera Utara	13.236.899.906.825,00	8.614.057.090.921,30	(34,9239)
3.	Sumatera Barat	6.482.418.683.405,20	5.637.501.625.930,30	(13,0340)
4.	Riau	9.499.559.746.229,20	6.554.436.778.806,50	(31,0027)
5.	Jambi	4.725.732.848.352,30	3.704.748.654.518,60	(21,6048)
6.	Sumatera Selatan	10.962.497.244.934,50	9.837.929.951.702,67	(10,258)
7.	Bengkulu	3.191.854.148.850,30	2.395.349.147.541,50	(24,9543)
8.	Lampung	7.451.703.679.830,80	4.798.142.574.580,60	(35,6101)

9.	Kepulauan Riau	3.958.295.361.262,70	3.393.963.641.827,40	(14,2569)
10.	Kepulauan Bangka Belitung	2.421.902.411.336,70	1.879.328.194.638,70	(22,4028)

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data Kemenkeu (2025)

Melihat trend pertumbuhan pendapatan daerah secara year-on-year wilayah provinsi di Pulau Sumatera mengalami kontraksi pertumbuhan pendapatan negatif, dimana deviasi pertumbuhan negatif terendah berada pada Provinsi Lampung sebesar (35,6101 %) sementara pertumbuhan negatif tertinggi berada pada Provinsi Sumatera Sumatera Selatan (10,258 %).

Tabel 3.41

Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 4 Tahun 2025 Terhadap Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,909	1,27	71,57

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2025)

Capaian kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB apabila dibandingkan dengan rencana target jangka menengah yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 telah mengalami tingkat kemajuan sebesar 71,57 %.

Perkembangan penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun total penerimaan pajak daerah oleh 17 (tujuh belas) Pemerintahan Kabupaten/Kota pada periode tahun 2010 – 2025 menunjukkan perkembangan peningkatan yang signifikan. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Daerah mengindikasikan bahwa basis data pajak yang semakin kuat, sinergi dan kolaborasi antar pemerintahan untuk menggali potensi pajak daerah yang semakin baik serta pola pengembangan ekstensifikasi pajak daerah yang semakin baik untuk meningkatkan ruang kebijakan investasi yang semakin baik.

3.1.5.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi pajak daerah terhadap PDRB pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.42
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 4 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Uraian Realisasi Tahun 2025		Persentase (%)
		Pajak Daerah Gabungan Pemerintah Daerah	PDRB	
1.	Aceh	2.295.047.804.953,20	243.202.090.000.000,00	0,944
2.	Sumatera Utara	9.991.452.491.400,00	1.146.919.760.000.000,00	0,871
3.	Sumatera Barat	3.347.873.097.654,50	332.936.440.000.000,00	1,006
4.	Riau	5.112.939.107.363,30	1.112.481.620.000.000,00	0,460
5.	Jambi	2.210.051.497.607,80	322.975.530.000.000,00	0,684
6.	Sumatera Selatan	5.926.089.762.430,31	721.850.695.820.000,00	0,909
7.	Bengkulu	1.099.609.462.942,60	103.991.920.000.000,00	1,057
8.	Lampung	3.651.155.865.729,30	483.882.920.000.000,00	0,755
9.	Kepulauan Riau	3.672.994.711.320,30	352.436.430.000.000,00	1,042
10.	Kepulauan Bangka Belitung	1.118.005.943.544,50	107.504.820.000.000,00	1,040

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2025)

Kontribusi pajak daerah terhadap PDRB tahun 2025 tertinggi pada Provinsi Bengkulu sebesar 1,057 % dan terendah pada Provinsi Riau sebesar 0,460 %. Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 0,909 %.

Struktur dan pola konsumsi masyarakat akan barang dan jasa di pasar produk untuk Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau sangat tinggi sehingga kontribusi pajak daerah menjadi kecil, apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 3.51
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 5 dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
6.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	45,835	55,64	82,39

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel (2025)

Capaian kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah apabila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD tahun 2025 – 2029 dan Renstra tahun 2025 – 2029 telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 82,39 %, hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian tahun 2025 sesuai dengan *on the track* dari dokumen perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Hal ini menggambarkan kondisi bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebesar 45,835 %, masih harus ditopang oleh sumber pembiayaan lainnya untuk pembangunan Sumatera Selatan

3.1.6.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.52
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 5 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Realisasi 2025		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	
1.	Aceh	2.438.548.157.184,20	10.155.352.045.785,00	24,01
2.	Sumatera Utara	4.303.372.94.6127,30	8.614.057.090.921,30	49,95
3.	Sumatera Barat	2.459.125.425.170,30	5.637.501.625.930,30	43,62
4.	Riau	3.300.211.675.762,50	6.554.436.778.806,50	50,35
5.	Jambi	1.627.530.950.212,60	3.704.748.654.518,60	43,93
6.	Sumatera Selatan	4.011.191.364.200,25	9.007.267.189.992,25	45,835
7.	Bengkulu	899.913.110.099,46	2.395.349.147.541,50	37,57
8.	Lampung	2.448.638.782.624,60	4.798.142.574.580,60	51,03
9.	Kepulauan Riau	1.502.040.887.431,20	3.393.963.641.827,40	44,26
10.	Kepulauan Bangka Belitung	691.429.311.150,70	1.879.328.194.638,70	36,79

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data Kemenkeu 2025

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah terbesar pada Provinsi Lampung sebesar 51,03 % sementara kontribusi terendah pada Provinsi Aceh sebesar 24,01 %. Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 45,835 %. Namun kondisi kontribusi PAD Sumatera Selatan masih dibawah 50 % yang mengindikasikan bahwa masih mempunyai ketergantungan pada transfer ke daerah.

Tabel 3.61
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 6 Tahun 2025 dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
7.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	93,198	N/A	N/A

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel 2025

3.1.7.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Realisasi kinerja pencapaian PAD terhadap target tahun 2025 apabila dibandingkan dengan pencapaian 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.62
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 6 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Pendapatan Asli Daerah 2025		Persentase (%)
		Realisasi	Target	
1.	Aceh	2.438.548.157.184,20	2.859.122.172.935,00	85,29
2.	Sumatera Utara	4.303.372.946.127,30	6.419.301.627.754,00	67,04
3.	Sumatera Barat	2.459.125.425.170,30	2.807.443.163.516,00	87,59
4.	Riau	3.300.211.675.762,50	5.200.915.848.254,00	63,45
5.	Jambi	1.627.530.950.212,60	2.074.503.864.666,00	78,45
6.	Sumatera Selatan	4.011.191.364.200,25	4.838.287.154.591,00	93,19
7.	Bengkulu	899.913.110.099,46	1.231.301.332.918,00	73,09
8.	Lampung	2.448.638.782.624,60	4.020.052.532.113,20	60,91
9.	Kepulauan Riau	1.502.040.887.431,20	1.904.763.732.160,40	78,86
10.	Kepulauan Bangka Belitung	691.429.311.150,70	986.551.719.389,04	70,09

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel Berdasarkan Data Kemenkeu Sumsel 2025

Realisasi capaian kinerja PAD terhadap target tahun 2025 tertinggi berada pada Provinsi Sumatera Selatan sebesar 93,198 % dan terendah pada Provinsi Lampung sebesar 60,91 %.

Tabel 3.71
Capaian Data Kinerja IKSS 7 Tahun 2025 dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
8.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	0,82	N/A	N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2025)

3.1.8.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)
Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.72
Perbandingan Realisasi Kinerja IKSS 7 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Uraian Tahun 2025		Persentase (%)
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB Non Migas	
1.	Aceh	2.438.548.157.184,20	243.202.090.000.000,00	1,00
2.	Sumatera Utara	4.303.372.946.127,30	1.146.919.760.000.000,00	0,38
3.	Sumatera Barat	2.459.125.425.170,30	332.936.440.000.000,00	0,74
4.	Riau	3.300.211.675.762,50	1.112.481.620.000.000,00	0,30
5.	Jambi	1.627.530.950.212,60	322.975.530.000.000,00	0,50
6.	Sumatera Selatan	4.509.197.075.145,67	661.074.620.000.000,00	0,68
7.	Bengkulu	899.913.110.099,46	103.991.920.000.000,00	0,87
8.	Lampung	2.448.638.782.624,60	483.882.920.000.000,00	0,51
9.	Kepulauan Riau	1.502.040.887.431,20	352.436.430.000.000,00	0,43
10.	Kepulauan Bangka Belitung	691.429.311.150,70	107.504.820.000.000,00	0,64

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2025)

Kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Lapangan Usaha Non Migas terbesar pada Provinsi Aceh dengan nilai sebesar 1,00 %, sementara kontribusi terkecil pada Provinsi Sumatera Utara dengan nilai sebesar 0,38 %, sementara Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 0,682 %.

Tabel 3.81
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 8 Tahun 2025 dengan Target RPJMD

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025		Target Akhir 2030	Tingkat Kemajuan (%)
3 9.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB 1	Rasio PAD Terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	2,097		N/A	N/A

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel (2025)

3.1.8.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah dengan 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera sebagai berikut:

Tabel 3.82
Perbandingan Capaian Kinerja IKSS 8 Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Provinsi	Uraian Tahun 2025		Rasio
		Pendapatan Asli Daerah	PDRB ADHB PKPD	
1.	Aceh	2.438.548.157.184,20	1.203.761.666.666,67	2,03
2.	Sumatera Utara	4.303.372.946.127,30	1.406.190.882.352,94	3,06
3.	Sumatera Barat	2.459.125.425.170,30	1.086.127.500.000,00	2,26
4.	Riau	3.300.211.675.762,50	1.951.934.615.384,62	1,69
5.	Jambi	1.627.530.950.212,60	1.142.010.833.333,33	1,43
6.	Sumatera Selatan	4.509.197.075.145,67	2.150.305.555.555,56	2,097
7.	Bengkulu	899.913.110.099,46	1.186.617.272.727,27	0,76
8.	Lampung	2.448.638.782.624,60	1.361.949.375.000,00	1,80
9.	Kepulauan Riau	1.502.040.887.431,20	1.317.737.500.000,00	1,14
10.	Kepulauan Bangka Belitung	691.429.311.150,70	869.270.000.000,00	0,80

Sumber : Berdasarkan Data LRA BPKAD Sumsel, BPS Sumsel dan Kemenkeu (2025)

Capaian realisasi kinerja kontribusi PAD terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah tertinggi pada Provinsi Sumatera Utara sebesar 3,06, terendah pada Provinsi Bengkulu sebesar 0,76, sementara Provinsi Sumatera Selatan memberikan kontribusi sebesar 2,097.